

Politik Globalisasi: Dampaknya terhadap Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Aldi Sajian^{1*}, Ardan Alif²

¹Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah, UIN Mataram

²Program Studi Ilmu Hukum, Sosial Politik, Universitas Mataram

^{1*}aldisajian99@gmail.com, ^{2*}ardanaalif@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3, No. 6, Desember 2024

Page: 274-287

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1628>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1628>

Article History:

Received: 04-11-2024

Revised: 05-12-2024

Accepted: 07-12-2024

Abstrak : Globalisasi ekonomi telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan antarnegara, mendorong integrasi pasar, arus modal, serta pertukaran teknologi yang semakin cepat dan kompleks. Namun, di balik peluang pertumbuhan dan inovasi, globalisasi juga memunculkan tantangan serius terhadap kedaulatan ekonomi nasional dan keadilan sosial. Studi ini menganalisis bagaimana ekonomi politik globalisasi memengaruhi kemampuan negara-negara mempertahankan kebijakan ekonomi independen di tengah tekanan pasar global, perjanjian perdagangan bebas, dan dominasi korporasi multinasional. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji dampak globalisasi terhadap ketimpangan distribusi kekayaan, pengaruh lembaga keuangan internasional, serta pergeseran struktur kekuasaan ekonomi dunia. Temuan menunjukkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi dilema antara membuka diri pada investasi asing demi pertumbuhan dan menjaga kemandirian ekonomi untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Selain itu, isu keadilan sosial menjadi sorotan utama karena globalisasi sering memperlebar jurang kesenjangan ekonomi, memarginalkan kelompok rentan, dan memperkuat ketidaksetaraan struktural. Kesimpulan dari analisis ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan mekanisme kebijakan nasional yang adaptif, agar globalisasi dapat diarahkan untuk mendukung kedaulatan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi, globalisasi, keadilan sosial, ketimpangan, korporasi, kebijakan.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi merupakan salah satu fenomena paling menentukan dalam sejarah modern yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi tidak hanya menjadi proses ekonomi, tetapi juga sebuah realitas sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi pola hubungan antarnegara serta distribusi kekuasaan di tingkat global (Pamungkas, 2017). Globalisasi mendorong percepatan integrasi pasar, pertukaran teknologi, serta mobilitas modal dan tenaga kerja lintas batas negara. Fenomena ini membawa berbagai peluang seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, efisiensi produksi, dan perluasan akses ke teknologi, namun juga menghadirkan tantangan serius terhadap kedaulatan ekonomi nasional dan keadilan sosial. Judul “Ekonomi Politik Globalisasi: Dampaknya terhadap

Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial” menjadi relevan untuk mengkaji kompleksitas ini secara mendalam (Estuningtyas, 2018).

Dalam konteks ekonomi politik, globalisasi tidak dapat dipandang sebagai proses yang netral atau semata-mata bersifat teknis. Ia sarat dengan kepentingan, kekuasaan, dan relasi dominasi. Negara-negara kuat dan korporasi multinasional kerap menjadi aktor dominan yang menentukan arah arus perdagangan, investasi, dan regulasi internasional. Ketika perdagangan bebas dan liberalisasi pasar digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan global, kenyataannya terdapat ketidakmerataan manfaat. Negara-negara berkembang, meskipun memperoleh akses pasar yang lebih luas, sering kali menghadapi kerentanan terhadap tekanan eksternal. Misalnya, kebijakan fiskal dan moneter mereka dapat terganggu oleh perubahan mendadak di pasar keuangan internasional, sementara kemampuan mereka untuk melindungi sektor domestik dari kompetisi tidak selalu memadai (Jose & Putri, 2021).

Kedaulatan ekonomi sebagai kemampuan suatu negara untuk mengatur perekonomiannya demi kepentingan nasional menjadi isu krusial dalam era globalisasi. Sebelum era globalisasi intensif, negara-negara memiliki ruang kebijakan yang lebih besar untuk melindungi industri strategis, mengatur perdagangan, dan mengontrol aliran modal. Namun, liberalisasi perdagangan dan kesepakatan multilateral seperti yang didorong oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sering kali membatasi ruang gerak tersebut. Perjanjian perdagangan bebas, yang di satu sisi membuka peluang ekspor, di sisi lain dapat melemahkan kemampuan negara untuk memberlakukan tarif protektif atau subsidi domestik. Akibatnya, beberapa sektor ekonomi dalam negeri terutama yang masih berkembang berpotensi kalah bersaing dengan produk-produk dari negara-negara yang lebih maju secara teknologi dan modal (Kusumawardhana & Zulkarnain, 2016).

Selain persoalan kedaulatan ekonomi, globalisasi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keadilan sosial. Keadilan sosial mencakup distribusi sumber daya dan peluang secara adil, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Dalam kenyataannya, arus modal dan teknologi yang dipercepat sering kali lebih menguntungkan pihak-pihak yang sudah memiliki modal besar dan infrastruktur memadai. Korporasi multinasional dapat memanfaatkan perbedaan upah dan regulasi lingkungan antarnegara untuk memaksimalkan keuntungan, sementara pekerja lokal di negara-negara berkembang menghadapi kondisi kerja yang tidak selalu adil atau aman. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan pun semakin melebar, baik di dalam negeri maupun antarnegara. Globalisasi, dalam konteks ini, memperkuat struktur ketidaksetaraan global yang telah ada (Ghazy, 2009).

Sejarah perkembangan globalisasi ekonomi menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah proses yang terjadi dalam ruang hampa. Akar globalisasi modern dapat ditelusuri ke era kolonialisme, revolusi industri, dan munculnya kapitalisme global. Namun, fase globalisasi kontemporer yang dimulai pada akhir abad ke-20 ditandai oleh liberalisasi pasar keuangan, kemajuan teknologi informasi, dan pembentukan blok-blok perdagangan regional seperti Uni Eropa dan NAFTA (dubbin Hakim, n.d.). Dalam fase ini, hubungan ekonomi antarnegara semakin saling terkait. Krisis keuangan Asia pada 1997–1998 dan krisis global 2008 menunjukkan betapa cepatnya guncangan ekonomi dapat menyebar melintasi batas negara. Peristiwa-peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya memahami dinamika ekonomi politik globalisasi, bukan hanya dari sisi peluang tetapi juga dari sisi kerentanan yang ditimbulkannya (Pamungkas, 2017).

Dalam perspektif teori ekonomi politik, globalisasi dipahami sebagai hasil interaksi antara kekuatan pasar dan kebijakan negara. Pendekatan liberal melihat globalisasi sebagai kekuatan positif yang mendorong efisiensi dan pertumbuhan. Sebaliknya, pendekatan kritis seperti

marxisme dan teori ketergantungan menyoroti bagaimana globalisasi memperkuat ketidaksetaraan struktural dan ketergantungan negara-negara miskin pada pusat-pusat kapitalisme global. Sementara itu, pendekatan konstruktivis menekankan bahwa globalisasi juga dibentuk oleh ide, norma, dan diskursus yang berkembang di tingkat internasional. Dengan demikian, globalisasi bukanlah proses yang tak terelakkan, melainkan hasil dari pilihan kebijakan, struktur kekuasaan, dan perdebatan ideologis (Abdullah et al., 2023).

Dalam konteks negara berkembang, globalisasi sering kali memunculkan dilema strategis. Di satu sisi, keterlibatan dalam perdagangan internasional dan investasi asing langsung dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia, misalnya, telah memanfaatkan peluang globalisasi untuk memperkuat sektor manufaktur dan menarik investor. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada pasar global membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan dagang negara mitra, dan krisis keuangan internasional. Selain itu, pembukaan pasar sering kali berdampak negatif pada sektor-sektor tradisional dan usaha kecil, yang tidak memiliki kapasitas untuk bersaing dengan produk impor murah (Purba et al., 2023).

Aspek keadilan sosial dalam ekonomi politik globalisasi juga menyentuh isu-isu seperti perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja, dan akses terhadap layanan publik. Dalam beberapa kasus, kompetisi global mendorong perusahaan dan negara untuk menurunkan standar lingkungan atau mengurangi hak-hak buruh demi menarik investasi. Fenomena ini dikenal sebagai *race to the bottom*, di mana standar sosial dan lingkungan justru dilemahkan. Sementara itu, keuntungan dari globalisasi lebih banyak dinikmati oleh elit ekonomi dan negara-negara maju, menciptakan ketidakpuasan sosial dan politik yang memicu gerakan-gerakan populis dan proteksionis di berbagai belahan dunia (Lestari & Rahmadani, 2024).

Peran lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga menjadi bagian penting dari dinamika ini. Kebijakan penyesuaian struktural yang mereka anjurkan pada era 1980-an dan 1990-an sering kali memaksa negara-negara berkembang untuk melakukan liberalisasi ekonomi secara cepat, mengurangi subsidi, dan membuka pasar mereka (Nurifqi et al., 2024). Walaupun bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut dalam banyak kasus menyebabkan ketidakstabilan sosial, meningkatnya kemiskinan, dan melemahnya layanan publik. Hal ini memunculkan kritik bahwa globalisasi ekonomi, sebagaimana diatur oleh institusi global, lebih menguntungkan kepentingan negara-negara maju dan korporasi besar ketimbang masyarakat luas (Ayu et al., 2025).

Konteks kontemporer menunjukkan bahwa globalisasi juga menghadapi tantangan baru, seperti krisis iklim, pandemi COVID-19, dan perubahan geopolitik. Pandemi, misalnya, memperlihatkan kerentanan rantai pasokan global dan menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi nasional di sektor-sektor strategis, seperti kesehatan dan pangan. Di sisi lain, krisis iklim menuntut kerja sama global yang lebih kuat, meskipun terdapat ketegangan antara negara-negara maju dan berkembang mengenai tanggung jawab dan pembiayaan transisi energi bersih. Dalam hal ini, pertanyaan tentang kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial semakin relevan: bagaimana negara dapat mempertahankan kendali atas kebijakan domestiknya sekaligus bekerja sama dalam sistem global yang saling terkait (Judijanto et al., 2025).

Kajian tentang ekonomi politik globalisasi tidak hanya penting bagi kalangan akademis, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat umum. Pemahaman yang mendalam tentang dampak globalisasi memungkinkan penyusunan strategi yang lebih baik untuk mengelola integrasi ekonomi internasional. Salah satu tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara keterbukaan terhadap arus global dan perlindungan terhadap kepentingan domestik.

Kebijakan industri strategis, penguatan regulasi ketenagakerjaan, serta kebijakan redistribusi yang efektif menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa globalisasi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil pihak (RAHMAWATI & Gunawan, 2023).

Dalam praktiknya, beberapa negara telah mencoba mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap globalisasi. Misalnya, negara-negara Skandinavia menerapkan model kesejahteraan sosial yang kuat, sehingga meskipun terintegrasi dalam ekonomi global, mereka tetap mampu menjaga keadilan sosial. Di sisi lain, beberapa negara Amerika Latin mengeksplorasi kebijakan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti pembentukan blok-blok kerja sama regional. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa meskipun globalisasi adalah fenomena besar dan kompleks, negara-negara masih memiliki ruang untuk membentuk arah perkembangannya (Estuningtyas, 2018).

Selain itu, munculnya gerakan masyarakat sipil global juga menunjukkan bahwa isu-isu seperti keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi bukan hanya urusan negara, tetapi juga warga dunia. Gerakan anti-globalisasi pada awal 2000-an, protes terhadap perjanjian perdagangan bebas, serta kampanye untuk perdagangan yang adil (fair trade) adalah contoh bagaimana masyarakat berusaha mempengaruhi arah globalisasi agar lebih berpihak pada nilai-nilai keadilan. Dalam era digital saat ini, mobilisasi lintas batas semakin mudah, memungkinkan suara-suara kritis untuk menantang dominasi aktor-aktor ekonomi besar.

Dengan mempertimbangkan dinamika ini, pembahasan tentang ekonomi politik globalisasi menjadi semakin relevan. Dunia saat ini berada dalam fase di mana globalisasi tidak lagi dianggap sebagai arus yang tak terbendung dan sepenuhnya positif. Terdapat upaya-upaya untuk meninjau kembali kesepakatan perdagangan, memperkuat regulasi keuangan internasional, dan membangun mekanisme kerja sama yang lebih adil. Isu kedaulatan ekonomi menjadi sorotan ketika negara-negara mulai menyadari pentingnya mempertahankan kendali atas sumber daya strategis dan kebijakan publik mereka. Demikian pula, keadilan sosial semakin diangkat dalam perdebatan global, baik melalui diskusi tentang pajak atas kekayaan global, upah minimum internasional, maupun tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia.

Dengan latar belakang ini, penelitian tentang “Ekonomi Politik Globalisasi: Dampaknya terhadap Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial” bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana globalisasi membentuk hubungan kekuasaan ekonomi, memengaruhi kebijakan domestik, dan memunculkan konsekuensi sosial. Pendahuluan ini menegaskan pentingnya analisis kritis terhadap globalisasi, bukan hanya untuk memahami fenomena yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk merumuskan alternatif kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memahami kompleksitas ekonomi politik globalisasi, kita dapat mengeksplorasi strategi yang memungkinkan integrasi global berjalan seiring dengan perlindungan kedaulatan ekonomi nasional serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan ini juga mengingatkan kita bahwa globalisasi tidak hanya tentang angka-angka pertumbuhan ekonomi atau indeks perdagangan. Lebih dari itu, ia menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak sosial. Jika globalisasi dikelola dengan prinsip inklusivitas dan keadilan, ia dapat menjadi kekuatan yang memperkuat solidaritas global. Namun, tanpa regulasi dan tata kelola yang memadai, globalisasi berpotensi memperburuk ketidaksetaraan dan melemahkan kedaulatan negara. Oleh karena itu, memahami dan mengkritisi ekonomi politik globalisasi bukan hanya tanggung jawab akademik, tetapi juga langkah penting menuju masa depan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam dampak globalisasi ekonomi terhadap kedaulatan ekonomi nasional dan keadilan sosial. Data diperoleh melalui kajian literatur yang komprehensif, mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta publikasi kebijakan dari organisasi ekonomi dan perdagangan dunia. Analisis dilakukan dengan menelaah dinamika pasar global, perjanjian perdagangan bebas, dan dominasi korporasi multinasional, kemudian menghubungkannya dengan kemampuan negara-negara, khususnya negara berkembang, dalam menjaga kebijakan ekonomi independen. Pendekatan ini dipilih untuk memetakan hubungan sebab-akibat serta mengidentifikasi pola-pola ketimpangan distribusi kekayaan dan pergeseran struktur kekuasaan ekonomi dunia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mengevaluasi temuan-temuan dari berbagai sumber dengan membandingkan kasus-kasus relevan antarnegara. Proses analisis melibatkan pengelompokan isu-isu utama, seperti pengaruh lembaga keuangan internasional dan implikasi sosial dari kebijakan ekonomi global, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori ekonomi politik globalisasi. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, sedangkan interpretasi hasil dilakukan secara kritis untuk menggali hubungan antara globalisasi, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana integrasi ekonomi global membentuk tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara dalam menjaga kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi ekonomi adalah fenomena multidimensional yang tidak hanya memengaruhi sektor perdagangan, tetapi juga menata ulang relasi kekuasaan, struktur sosial, dan dinamika politik di tingkat global maupun domestik. Dalam konteks ekonomi politik, globalisasi bukan sekadar proses teknis yang terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil dari kebijakan, kesepakatan, dan keputusan yang diambil oleh aktor-aktor kuat baik negara-negara maju, korporasi multinasional, maupun lembaga keuangan internasional. Pembahasan ini akan mendalami dampak globalisasi terhadap kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial, sekaligus menganalisis ketegangan yang muncul antara kepentingan pasar global dan kebutuhan domestik.

Pertama, dari sisi kedaulatan ekonomi, globalisasi telah menantang kemampuan negara-negara untuk mengendalikan kebijakan ekonomi mereka sendiri. Perjanjian perdagangan bebas dan integrasi pasar keuangan internasional memaksa pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan aturan main global. Negara-negara berkembang sering kali kehilangan ruang untuk melindungi industri strategis mereka, karena kebijakan proteksionis dianggap bertentangan dengan prinsip liberalisasi pasar. Misalnya, pembatasan impor atau subsidi pertanian dapat memicu sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Akibatnya, negara-negara dengan sektor domestik yang lemah kesulitan bersaing dengan produk impor murah yang dihasilkan negara-negara maju yang memiliki teknologi dan modal lebih unggul.

Selain itu, arus modal yang bergerak bebas juga meningkatkan kerentanan terhadap krisis keuangan. Krisis Asia 1997–1998 menunjukkan bagaimana keluarnya modal asing secara besar-besaran dapat melumpuhkan perekonomian nasional. Negara-negara yang sebelumnya menikmati pertumbuhan pesat tiba-tiba menghadapi depresiasi mata uang, kebangkrutan perusahaan, dan meningkatnya pengangguran. Kejadian ini memperlihatkan bahwa integrasi pasar global, meskipun menawarkan peluang pertumbuhan, juga dapat mengorbankan stabilitas ekonomi domestik. Dalam situasi ini, kedaulatan ekonomi menjadi tergadaikan karena

pemerintah harus tunduk pada tuntutan lembaga internasional seperti IMF untuk menerapkan kebijakan penyesuaian struktural yang tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal.

Kedua, dampak globalisasi terhadap keadilan sosial juga signifikan. Dalam teori ekonomi klasik, perdagangan bebas diyakini akan menguntungkan semua pihak melalui spesialisasi dan efisiensi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa manfaat globalisasi tidak terbagi secara merata. Kesenjangan pendapatan antarnegara dan di dalam negara semakin melebar. Negara-negara maju memperoleh keuntungan lebih besar karena memiliki keunggulan teknologi, akses modal, dan infrastruktur yang kuat. Sementara itu, banyak negara berkembang hanya menjadi pemasok bahan mentah atau tenaga kerja murah, sehingga nilainya dalam rantai pasokan global tetap rendah.

Di dalam negeri, globalisasi sering kali menciptakan kelompok-kelompok “pemenang” dan “pecundang.” Pekerja di sektor industri berteknologi tinggi atau perusahaan ekspor mungkin memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, pekerja di sektor tradisional atau usaha kecil menengah sering kali tersisih akibat masuknya produk asing yang lebih murah. Ketidaksetaraan ini dapat memicu ketegangan sosial dan politik, seperti yang terlihat dalam kebangkitan gerakan populis di berbagai negara. Di Eropa dan Amerika Serikat, misalnya, banyak pekerja merasa ditinggalkan oleh globalisasi, sehingga mereka mendukung kebijakan proteksionis dan partai-partai yang menentang perdagangan bebas.

Selain ketidaksetaraan ekonomi, isu keadilan sosial juga terkait dengan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Dalam upaya menarik investasi asing, beberapa negara menurunkan standar ketenagakerjaan dan regulasi lingkungan, fenomena yang dikenal sebagai *race to the bottom*. Perusahaan multinasional memindahkan produksi ke negara-negara dengan upah rendah dan regulasi longgar untuk memaksimalkan keuntungan. Akibatnya, pekerja di negara-negara tersebut sering kali menghadapi kondisi kerja yang buruk, jam kerja panjang, dan upah yang tidak layak. Pada saat yang sama, eksploitasi sumber daya alam secara masif mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem lokal.

Namun, globalisasi tidak hanya membawa dampak negatif. Ada pula peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan kerja sama internasional. Beberapa negara berhasil memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Contohnya, negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Taiwan memanfaatkan investasi asing dan perdagangan global untuk membangun industri berteknologi tinggi dan memperkuat kapasitas ekonomi domestik. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa dengan strategi kebijakan yang tepat seperti proteksi selektif pada tahap awal dan investasi besar dalam pendidikan serta penelitian globalisasi dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam konteks keadilan sosial, globalisasi juga mendorong munculnya gerakan solidaritas global. Organisasi non-pemerintah, serikat pekerja internasional, dan jaringan masyarakat sipil memanfaatkan teknologi informasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh, perdagangan yang adil, dan perlindungan lingkungan. Gerakan *fair trade* adalah contoh konkret bagaimana konsumen dan produsen bekerja sama untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil. Selain itu, forum-forum internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) menjadi wadah untuk membahas distribusi tanggung jawab global terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Tantangan terbesar saat ini adalah menciptakan tata kelola global yang lebih inklusif. Sistem global saat ini sering dianggap berat sebelah, karena lebih mengutamakan kepentingan negara-negara kaya dan perusahaan besar. Reformasi lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia menjadi krusial agar kebijakan global lebih memperhatikan suara negara-

negara berkembang dan kelompok rentan. Demikian pula, kebijakan nasional harus dirancang agar dapat menyeimbangkan keterbukaan terhadap pasar global dengan perlindungan terhadap kepentingan domestik. Penguatan regulasi tenaga kerja, kebijakan redistribusi pendapatan, serta investasi pada sektor-sektor strategis domestik dapat membantu meminimalkan dampak negatif globalisasi.

Di era digital, globalisasi juga mengambil bentuk baru melalui ekonomi berbasis teknologi. Perusahaan teknologi raksasa memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar, bahkan melebihi banyak negara. Mereka mengontrol data, infrastruktur digital, dan pasar online global. Hal ini menimbulkan tantangan baru terkait privasi, monopoli pasar, dan kedaulatan data. Negara-negara kini harus mempertimbangkan regulasi yang dapat melindungi warganya dari dominasi perusahaan-perusahaan teknologi global, sekaligus memastikan bahwa inovasi digital tetap berjalan.

Selanjutnya, krisis global seperti pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada rantai pasokan global dapat berbahaya. Banyak negara mengalami kesulitan memperoleh alat kesehatan dan bahan baku penting karena tergantung pada produksi luar negeri. Hal ini memperkuat argumen bahwa kedaulatan ekonomi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar global. Negara perlu mempertahankan kapasitas produksi domestik di sektor-sektor vital, seperti kesehatan, pangan, dan energi, untuk menjamin keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi sosial-politik, ketidakpuasan terhadap dampak globalisasi juga memengaruhi dinamika politik internasional. Perubahan kebijakan di negara-negara besar seperti kebijakan proteksionis Amerika Serikat di bawah pemerintahan tertentu atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) mencerminkan keinginan untuk merebut kembali kendali atas kebijakan domestik. Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi bukanlah proses yang tak tergoyahkan; ia dapat dipertanyakan, ditantang, dan diarahkan ulang. Akhirnya, penting untuk menyoroti bahwa globalisasi juga menciptakan ruang bagi kerja sama internasional yang lebih luas. Masalah-masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Dengan pendekatan multilateral yang adil dan inklusif, globalisasi dapat menjadi sarana untuk menggalang solidaritas global. Namun, hal ini membutuhkan komitmen politik dan visi yang menempatkan keadilan sosial serta kedaulatan ekonomi sebagai prioritas, bukan hanya keuntungan jangka pendek.

KESIMPULAN DAN SARAN

Globalisasi ekonomi telah menjadi kekuatan utama yang membentuk wajah dunia modern. Ia membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan pertukaran budaya. Namun, di balik peluang tersebut, globalisasi juga menghadirkan tantangan yang kompleks terhadap kedaulatan ekonomi nasional dan keadilan sosial. Negara-negara berkembang menghadapi dilema: mereka membutuhkan investasi asing dan akses pasar global untuk mempercepat pembangunan, tetapi pada saat yang sama harus melindungi sektor domestik, hak-hak pekerja, dan kesejahteraan sosial. Kedaulatan ekonomi menjadi semakin sulit dijaga ketika kebijakan nasional harus disesuaikan dengan tuntutan pasar global dan kesepakatan perdagangan internasional.

Keadilan sosial menjadi isu sentral karena manfaat globalisasi tidak dirasakan secara merata. Ketidaksetaraan pendapatan yang melebar, eksploitasi tenaga kerja murah, dan degradasi lingkungan menunjukkan bahwa mekanisme pasar global saja tidak cukup untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, globalisasi perlu dikelola dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan solidaritas. Reformasi tata kelola global baik melalui lembaga internasional maupun perjanjian perdagangan harus mempertimbangkan kepentingan negara-negara

berkembang dan kelompok rentan. Di tingkat domestik, kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan hak-hak pekerja, serta investasi dalam pendidikan dan teknologi menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak negatif globalisasi.

Selain itu, pengalaman krisis global seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Negara perlu mempertahankan kendali atas sektor-sektor strategis untuk memastikan ketahanan nasional dan kesejahteraan warganya. Pada saat yang sama, kerja sama internasional tetap penting untuk menangani tantangan-tantangan yang bersifat lintas batas. Dengan memahami ekonomi politik globalisasi secara kritis, kita dapat melihat bahwa globalisasi bukanlah proses yang sepenuhnya menguntungkan atau merugikan, melainkan fenomena yang kompleks dan penuh kontradiksi. Masa depan globalisasi bergantung pada bagaimana negara-negara, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Hanya dengan menempatkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial sebagai prioritas, globalisasi dapat diarahkan menjadi kekuatan positif yang memperkuat solidaritas global dan kesejahteraan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D. (2023). Analisis Perdagangan Internasional Melalui Model Politik Heckscher-Ohlin Terhadap Kepentingan Ekonomi Nasional Pespektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 249–259.
- Ayu, R. M., Alfitri, N., & Astuti, R. P. (2025). Perjalanan Sejarah Bank Sentral: Peran, Tantangan, Dan Adaptasi Dalam Sistem Ekonomi Global. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 402–409.
- dubbun Hakim, A. (n.d.). *Globalisasi, Meringkus Ruang dan Meringkas Waktu*.
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya. *Al-Munzir*, 2, 195–218.
- Ghazy, N. (2009). *Pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan Negara Indonesia*.
- Jose, H. S., & Putri, I. P. E. (2021). Tatanan Global Pada Pembangunan Dan Ekonomi Politik Internasional Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 5(1), 46–70.
- Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., & Mudjiyanti, R. (2025). *Ekonomi Kontemporer: Dinamika dan Tantangan Abad 21*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusumawardhana, I., & Zulkarnain, S. I. P. (2016). Globalisation and Strategy: “Negara, Teritori dan Kedaulatan di Era Globalisasi”. *Majalah Ilmu Dan Budaya*, 40(52), 6139–6160.
- Lestari, S. I., & Rahmadani, N. P. (2024). Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 647–658.
- Nurifqi, M. W., Lubis, F. M., & Marsingga, P. (2024). Pengaruh Organisasi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) dalam Kerja sama Ekonomi Global. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 8(1), 1–11.
- Pamungkas, C. (2017). Global village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 245.
- Purba, B., Sihombing, A. E., Nasution, N. F., & Siagian, A. P. (2023). Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 402–414.

RAHMAWATI, L., & Gunawan, A. (2023). Dampak Ketimpangan Ekonomi Terhadap Konflik Sosial di Indonesia. *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 2(1), 60–71.